

POLA KOMUNIKASI ORGANISASI DPRD SUKOHARJO
(Studi Deskriptif Kualitatif Karakteristik Birokrasi DPRD
Sukoharjo berdasarkan Teori Birokrasi Max Webber)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika

Oleh:

NABILA ZULFIKA ULFAH

L 100 130 039

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

POLA KOMUNIKASI ORGANISASI DPRD SUKOHARJO
(Studi Deskriptif Kualitatif Karakteristik Birokrasi DPRD Sukoharjo berdasarkan Teori Birokrasi
Max Webber)

PUBLIKASI ILMIAH

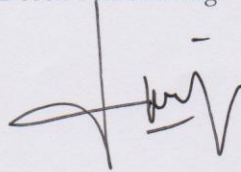
oleh:

NABILA ZULFIKA ULFAH

L100130039

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Dian Purworini, MM

NIK : 1102

HALAMAN PENGESAHAN

POLA KOMUNIKASI ORGANISASI DPRD SUKOHARJO

(Studi Deskriptif Kualitatif Karakteristik Birokrasi DPRD Sukoharjo berdasarkan Teori Birokrasi Max Webber)

OLEH

NABILA ZULFIKA ULFAH

L100130039

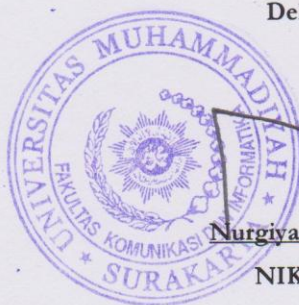
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Komunikasi dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jum'at, 04 Mei 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Dian Purworini, MM
(Ketua Dewan Penguji)
2. Joko Sutarso, M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Yanti Haryanti, MA
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



Nurgiyatna, Ph.D

NIK. 881

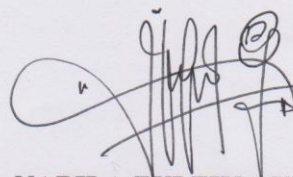
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 05 April 2018

Penulis



NABILA ZULFIKA ULFAH

L100130039

POLA KOMUNIKASI ORGANISASI DPRD SUKOHARJO

(Studi Deskriptif Kualitatif Karakteristik Birokrasi DPRD Sukoharjo berdasarkan Teori Birokrasi Max Webber)

Abstrak

DPRD merupakan sebuah sub setara pemerintahan, yang memiliki fungsi untuk memutuskan, menjalankan, dan mengawasi, bersama dengan pemerintahan daerah dan bentuk otonomi daerah dengan asas pemerintahan. DPRD juga menjadi kepanjangan tangan masyarakat, untuk menyampaikan segala aspirasi kepada pemerintah daerah. Pada hakikatnya, DPRD sudah menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki kewenangan setara dengan pemerintahan. Penataan administrasi biasa dikenal dengan birokrasi. Birokrasi merupakan bagian dari organisasi formal, dimana dalam penelitian ini birokrasi sebagai sebuah tatanan administratif yang bersifat kompleks dan hierarkis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi organisasi, yang terjadi dalam organisasi pemerintahan seperti DPRD Sukoharjo, sehingga penelitian ini dilakukan di Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode snowball sampling, dimana metode ini berangkat dari satu informan dan akan terus bertambah seiring jalannya waktu penelitian. Biasanya informan selanjutnya merupakan hasil rekomendasi dari informan sebelumnya. Informan dalam penelitian ini di ambil dari ketua hingga anggota dewan DPRD Sukoharjo yang berkaitan langsung dengan praktik birokrasi di DPRD Sukoharjo. Selain itu, peneliti menggunakan wawancara mendalam dengan pertanyaan diberikan secara acak, dan memberikan kebebasan kepada informan, untuk memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan data yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini mengarah kepada terbentuknya komunikasi formal dan informal dalam DPRD Sukoharjo, dimana komunikasi formal mencakup dalam hal rapat, memo, diskusi, dan pembagian tugas. Di sisi lain komunikasi informal terbangun antara anggota DPRD Sukoharjo dalam konversi pesan sebelumnya yang di sampaikan secara formal.

Kata Kunci : Pola komunikasi, organisasi, birokrasi, DPRD.

Abstract

The local parliament is a sub equivalent of government which is has a function to decide, run and supervise, together with the regional government and the form of regional autonomy on the basis of government. The parliament also become stakeholders of the community to deliver all the aspirations of the regional government. In fact, local parliament has become part of the community that have equal authority with the rule. Administrative arrangement, known as bureaucracy. The bureaucracy is part of the formal organization where in this research bureaucracy as an administrative order that is complex and hierarchial evidence on. This research aims to know the communication pattern of the organization that happens in government organizations such as the local parliament of Sukoharjo, for it is this research done in Sukoharjo. This research uses snowball sampling method, where this method journeyed from one informers and will continue to

increase along the way the research. Usually the next informants is the result of recommendations from the previous informants. Informers in this research are taken from head to the member of the board of the local parliament of Sukoharjo directly related to the practice of the bureaucracy in the local parliament of Sukoharjo. In addition researchers using the in-depth interviews with questions given in random order and giving freedom to the informers, to give an answer in accordance with the needs of the data needed. The results of this research lead to the formation of formal and informal communication in the local parliament of Sukoharjo, where formal communication includes in this meeting, memos, discussion and division of tasks. On the other side of the communication informal wakes up between members of the local parliament of Sukoharjo, in the conversion of the previous message that in mention formally.

Keywords : patterns of communication, organization, bureaucracy, local parliament.

1. PENDAHULUAN

Organisasi saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, yang sama sekali tidak bisa dipisahkan. Setiap unsur masyarakat memiliki organisasi dengan bentuk manajemen dan komunikasi masing masing. Berbicara mengenai organisasi, tidak hanya yang ada di lingkungan masyarakat maupun pendidikan, namun sistem pemerintahan juga bentuk dari organisasi. Manajemen yang diterapkan saat ini menggunakan birokrasi sebagai tatanan manajemen yang kompleks. Myint (2015) mengungkapkan, birokrasi dapat didefinisikan sebagai sebuah bagian dari organisasi formal, tersusun berdasarkan sebuah administrasi komplek, hirarki, membutuhkan sebuah kemampuan dan kapasitas pengelolaan yang baik, menentukan batasan kerahasiaan administratif dan transparan yang seterusnya menjadi aturan utamanya.

Birokrasi sudah bukan hal yang baru dalam bagian organisasi internasional khususnya di negara kita Indonesia. Puluhan tahun lamanya pemerintahan kita sudah menerapkan birokrasi sebagai bagian dari administratif. Menilik sejarah bagaimana birokrasi telah berjalan di Indonesia, Suwarno (2008) menjelaskan, pada masa penjajahan kolonial Belanda dimana saat itu Belanda dapat memanfaatkan kelemahan petinggi lokal untuk kepentingan eksistensinya, walaupun saat itu petinggi lokal telah dilibatkan dalam administrasi publiknya. Pimpinan lokal hanya diberikan posisi sebagai *ambtenaar* yang berorientasi

sangat sentralis, sehingga tidak memberikan inisiatif lokal dan pengambilan keputusan secara mandiri. Pada masa periode Orde Baru, presiden Suharto telah berhasil membangun sebuah struktur dan sistem birokrasi yang berada didalam kontrolnya. Ia mengurangi jumlah kementerian yang begitu besar sebelumnya, serta membangun suatu sistem yang sebenarnya lebih seperti sebuah sistem militer, sehingga hal ini menjamin kesetiaan jajaran birokasinya.

Melihat substansinya dari masa pemerintahan orde lama hingga saat ini, sistem pemerintahan Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian pemerintahan. Hal yang menarik disini, bukan presiden yang menjadi simbol pemerintahan tertinggi, melainkan satu tingkat diatasnya adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR merupakan bentuk perwakilan suara masyarakat, yang ikut serta memberikan sumbangan terhadap penentuan kebijakan pemerintah. Menurut Somad (2011), DPR tidak hanya menjadi bagian dari pemerintahan pusat namun juga mencakup otonomi pemerintahan daerah juga yang sering disebut sebagai DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). DPRD sebagai pemberi pelayanan publik perlu mengetahui dimensi pekerjaanya, untuk dapat melaksanakan pelayanan publik serta praktik birokratik yang sehat. Salah satu yang menjadi titik utama dalam berjalanya birokrasi didalam DPRD adalah Sekretariat DPRD, yang mana memiliki kedudukan sebagai unsur pelayanan DPRD. Sekretariat DPRD disaat yang sama pun harus mampu merumuskan kebijakan, yang berkaitan dengan pelayanan DPRD. Selain itu sekretaris DPRD perlu menyiapkan bahan koordinasi, merumuskan, menganalisa program, dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas, di bidang perundang undangan serta penerimaan aspirasi dan informasi.

Sebagai mitra dari pemerintahan daerah, dalam hal ini pemerintahan kota maupun kabupaten DPRD Sukoharjo, selalu berusaha bebenah, memberikan serta menjalankan kewajibanya, sebagai wakil rakyat. DPRD juga telah ditetapkan sebagai intitusi setara dengan pemerintahan daerah. Asmawi (2014) menyebutkan, kedudukan DPRD yang sejajar bersama dengan kepala daerah, melaksanakan fungsi – fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Selain itu kewajiban sebagai anggota dewan yang

mewakili aspirasi rakyat, tentunya anggota DPRD Sukoharjo selalu membuka peluang kepada seluruh masyarakatnya di seluruh Kabupaten Sukoharjo, untuk memberikan masukan serta aspirasi. Dalam wawancara kepada informan Pak Loubrin selaku sekretaris DPRD, beliau menjelaskan bahwa praktik birokrasi yang berjalan dalam DPRD Sukoharjo, sudah dijalankan sesuai dengan tugas dan jabatan yang di berikan, baik dalam satuan komisi maupun satuan kedewanan yang merupakan alat kelengkapan dari DPRD Sukoharjo. Birokrasi yang berjalan di DPRD Sukoharjo pun terlaksana sebagai mana mestinya. Begitu juga alur hingga bentuk komunikasi yang terbangun di dalamnya. Komunikasi yang terbangun di dalamnya tidak hanya bagaimana seluruh anggota DPRD Sukoharjo dapat menyampaikan aspirasinya secara individual, namun juga membentuk bagaimana menyampaikan aspirasi tersebut, hingga pembentukan sikap dalam penyampaian pesan berupa aspirasi yang ingin di sampaikan.

Birokrasi selalu menjadi sebuah pembahasan yang menarik dan mengundang para ahli untuk terus mengembangkan praktik teori dari birokrasi. Mengenal birokrasi, pasti akan langsung teringat dengan pakar ahli yang mengemukakan konsep dari birokrasi, yaitu Max Weber. Weber dikenal menjadi seorang ahli teori dalam bidang birokrasi. Teorinya mengenai birokrasi menjadi acuan dalam implementasi birokrasi di pemerintahan saat ini. Salah satunya adalah bagaimana Weber mengasumsikan bahwa birokrasi terbentuk dari sebuah susunan definitif, terdiri dari bagian bagian ahli yang teratur dalam administratif yang kompleks serta hirarki. Samin (2012) menjelaskan, dari asumsi inilah Weber juga menggolongkan beberapa karakteristik birokrasi organisasi yang baik, seperti birokrasi dalam organisasi memiliki struktur organisasi, tugas serta tujuan organisasi terbagi dalam jabatan jabatan, dan beberapa karakteristik lainnya. Birokrasi dalam pemerintahan juga memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap segala suatu kebijakan publik sekaligus evaluasi kinerjanya.

Birokrasi dan komunikasi tidak bisa terpisah masing masing. Keduanya menjadi satu bagian dalam alur sebuah kegiatan organisasi, baik secara administratif maupun non administratif. Melihat sebuah organisasi khususnya

pemerintahan, selalu memerlukan interaksi dan informasi baik menerima maupun menyampaikan informasi tersebut. Fitriawan, Putra dan Nugroho (2017) menjelaskan, komunikasi di lain sisi menjadi rangka pembangun dari birokrasi organisasi yang kompleks dan hirarkis. Untuk itu terdapat berbagai macam pola komunikasi organisasi yang berjalan didalamnya. Komunikasi yang terikat dalam birokrasi ini adalah suatu organisasi pemerintahan, yang menjalankan tugas tugas penyelenggaraan pemerintahan. Kita mengenal komunikasi formal, yang terbentuk dari kepada siapa kita berbicara atau penyampaian pesan berdasarkan stukturasi atau jabatannya dalam organisasi. Di samping itu, dalam birokrasi organisasi juga terbangun komunikasi informal yang bertujuan mengkonfirmasi pesan yang mungkin kurang jelas saat penyampaian sebelumnya. Komunikasi informal sendiri terbentuk berdasarkan rasa dan minat tertentu antar sesama anggota organisasi. Penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana pola komunikasi organisasi dalam sebuah instansi setara pemerintah seperti DPRD Sukoharjo jika dilihat dari birokrasi DPRD Sukoharjo berdasarkan karakteristik birokrasi Max Webber.

2 METODE

Rahmat (2009) menjelaskan, segala bentuk kegiatan penelitian memerlukan sebuah bentuk metode yang jelas, metode dalam penelitian inilah yang akan menjadi bentuk penjabaran dari proses, media yang digunakan dalam penelitian hingga hasil akhir dari penelitian itu sendiri. Mengacu pada peran metode dalam sebuah penelitian, penulis mencoba menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Kriyantono (2006) mengatakan, tujuan dari deskriptif itu sendiri membuat deskripsi menjadi sistematis, aktual, dan akurat tentang fakta fakta dan sifat sifat populasi atau objek tertentu. Metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan secara mendalam secara menyeluruh berdasarakan data data yang telah dikumpulkan sebelumnya mengenai birokrasi yang terjadi di DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampling *snowball*. Kriyantono (2006) menyebutkan, teknik sampling *snowball* merupakan teknik

sampel yang awalnya berjumlah kecil, kemudian berkembang semakin banyak. Pawito (dalam Setyawan, 2017) menyebutkan, teknik snowball sampling ini untuk mengimplikasikan jumlah sampel yang semakin membesar seiring dengan berjalannya waktu pengamatan. Pengambilan data dari informan berawal dari seorang informan untuk awal pengumpulan data. Pada informan ini, peneliti menanyakan siapa lagi orang yang pantas atau berhak diwawancarai, kemudian informan bergerak kepada informan selanjutnya sesuai dengan referensi atau arahan dari informan sebelumnya, dan proses ini terus berulang ulang hingga peneliti yakin data yang dibutuhkan dari informan ini sudah mencukupi.

Pelaksanaan dalam memilih informan sebagai bentuk sampling dalam penelitian ini adalah orang – orang atau responden yang masuk dalam struktur organisasi DPRD Kab Sukoharjo. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil empat orang informan, dimana masing-masing informan memiliki jabatan yang berbeda. Informan tersebut terdiri dari pimpinan dewan, sekretaris dewan, ketua komisi, dan juga ketua fraksi. Jenis data dalam penelitian ini berdasarkan sumber, terbagi menjadi dua. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari objek penelitian dengan melakukan wawancara terhadap sample yang telah dipilih oleh penulis, dimana sample dalam pengumpulan data primer ini adalah anggota pemangku jabatan dalam DPRD Kab Sukoharjo, sementara data skunder yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini didapat dari studi literatur, baik dari jurnal, buku referensi hingga artikel media cetak maupun media elektronik yang membahas tentang bentuk birokrasi, definisi maupun prakteknya dalam sebuah organisasi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam. Purworini (2014) menjelaskan, wawancara mendalam dilakukan oleh peneliti secara terbuka dan memberikan kebebasan kepada informan untuk menjawab, terkadang penelitian bersifat grounded, sehingga kerap sekali peneliti melakukan wawancara secara mendadak terhadap informan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Peneliti mengajukan pertanyaan mendasar tentang bentuk, karakteristik, hingga

implementasi atau prakteknya dalam kegiatan administratif di DPRD Kabupaten Sukoharjo. Teknik analisis data yang digunakan penulis mengacu kepada teknik yang digagas Miles dan Huberman dalam Iskandar dkk (2014), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Redukis meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema dan membuat gugus gugus. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk teks naratif yang berupa hasil dari catatan lapangan. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan oleh penulis berulang ulang selama berada di lapangan dan mengkonfigurasi dengan data data yang telah diperoleh oleh penulis.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Melihat daftar anggota DPRD Sukoharjo hingga tanggal 22 Januari 2018 berjumlah 45 orang. Rincian susunan struktur DPRD Sukoharjo sendiri terdiri dari 4 pimpinan dan diisi oleh kelembagaan kelembagaan lainnya seperti fraksi, dimana fraksi merupakan kepanjangan tangan partai didalam pemerintah. Selain fraksi, ada juga komisi yang terdiri dari 4 komisi. Komisi satu membidangi hukum dan pemerintahan, komisi dua membidangi ekonomi, komisi tiga membidangi bagian infrastruktur dan komisi 4 membidangi sosial dan pendidikan. Selain fraksi dan komisi, ada juga yang disebut dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Badan kehormatan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah bertanggung jawab membuat rancangan peraturan daerah yang akan diusulkan ke pemerintahan pusat. Badan Anggaran bertanggung jawab menyusun anggaran dan merancang APBD yang akan digunakan selama per satu tahun masa pemerintahan. Badan Musyawarah bertanggung jawab membuat seluruh kegiatan DPRD selama masa satu tahun kegiatan. Terakhir yaitu Badan Kehormatan yang memiliki wewenang mengatur kedisiplinan aturan didalam DPRD Sukoharjo.

Menurut pimpinan dewan, kelembagaan dan struktur birokrasi di DPRD Sukoharjo sudah sesuai dengan nomenklatur pemendagri tentang pemerintahan daerah kabupaten serta provinsi. Melihat dilapangan berdasarkan data yang

didapatkan oleh penulis saat menghimpun data di DPRD Sukoharjo, proses komunikasi pada sistem birokrasi sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Penyampaian pesan secara instruktif sebagai bentuk birokrasi yang memiliki stukturasi hirarki, persis seperti yang digambarkan oleh weber juga. Sebagai contoh bagaimana ketua dewan memberikan arahan kepada anggota legislatif untuk bisa turun, terjun langsung untuk menemui rakyat di masing – masing daerah pemilihanya, serta ketua komisi dalam menghimpun aspirasi dari anggota komisi untuk di sampaikan dalam rapat terbuka maupun tertutup yang pada hasilnya nanti akan di sahkan oleh ketua DPRD Sukoharjo. Pengumpulan data ini begitu penting yang nantinya dijadikan sebuah landasan analisis birokrasi DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan karaktetik birokrasi teori Max Weber.

Melihat struktur DPRD Sukoharjo dapat dianalisa bahwa DPRD Sukoharjo memiliki sebuah pola komunikasi. Pola komunikasi yang dibangun sebagai sebuah kelembagaan pemerintah yang bersifat mitra, tentunya menjadi hal yang menarik. Komunikasi yang dibangun baik antar jabatan se DPRD Sukoharjo, namun juga antar pemeritah kabupaten Sukoharjo tidak hanya sebatas sebuah komunikasi interpersonal namun juga berdasarkan dari kelembagaan DPRD Sukoharjo sendiri. Birokrasi yang terjadi daalam DPRD Sukoharjo tentunya juga mempengaruhi gaya dan pola komunikasi yang ada didalamnya. Jika dilihat dari struktur dan birokrqasi yang berjalan di dalam DPRD Sukoharjo dapat dikaitakan dengan pola komunikasi organisasi yang memiliki jaringan komunikasi formal dan komunikasi informal. Bentuk jaringan komunikasi formal merupakan sistem yang mengatur dan dirancang untuk menentukan siapa berbicara kepada siapa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau pekerjaan. Penggambaran jaringan komunikasi formal sesederhanya dapat dilihat dari bentuk stuktur organisasi, lembaga tersebut. Sehingga, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan penerima yang teoat dan mendapatkan respon atau feedback yang sesuai dengan informasi yang disampaikan. Sedangkan komunikasi informal merupakan jaringan komunikasi yang terbangun di luar komunikasi formal, dapat diartikan komunikasi ini terbangun berdasarkan pertemanan, kedekatan antar

pemangku jabatan, hingga berdasarkan minat tertentu. Konteks dari jaringan komunikasi informal juga sama dengan komunikasi formal, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ingin diselesaikan.

Jaringan inilah yang terbangun dalam DPRD Sukoharjo sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memiliki strukturasi yang legal dan hirarki. Berikutini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti secara langsung mengenai pola komunikasi organisasi DPRD sukoharjo. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pemangku jabatan di DPRD Sukoharjo, baik ketua, sekretaris dewan, ketua komisi hingga ketua fraksi.

3.1.1 Komunikasi Formal dalam DPRD Sukoharjo

Siagian dalam Harsono dkk (2015) menyatakan, manusia sebagai sumber daya organisasi sangat penting untuk kepentingan dan kemajuan organisasi. karena manusia dalam menjalankan aktifitas dalam organisasinya, diwujudkan dalam bentuk karya, kreatifitas, bakat, dan peran nyata yang dapat diukur produktifitasnya. Sebagai bagian dari pemerintahan khususnya pemerintahan kabupaten, DPRD Sukoharjo memiliki struktuasi jabatan yang di tetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kesatuan yang hirarki. Struktur ini sudah ditetapkan berdasarkan undang – undang no 18 tahun 2016, tentang perangkat daerah, dan ditindak lanjuti dengan permendagri no 104 tentang nomenklatur sekretariat dewan provinsi dan kabupaten kota. Struktur DPRD tidak hanya terdiri dari ketua maupun sekretaris, disamping itu DPRD memiliki beberapa badan kelengkapan yang bertanggung jawab atas segala bentuk kelangsungan jalanya tugas yang telah disepakati selama periode yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 1, yaitu :

“kalau kondisi birokrasi dalam nomenklatur strukturalnya, kita sudah menyesuaikan dengan undang-undang nomer 18 tahun 2016, tentang perangkat daerah. Terus di tindak lanjuti dengan permendagri 104 tentang nomenklatur sekretariat dewan propinsi dan kabupaten kota. Jadi, kita sudah menyesuaikan regulasi yang ada.” (Pak Loubrin, 05 Januari 2018)

Kondisi struktur kepemimpinan dan keanggotan dewan yang telah sesuai dengan nomenklaturnya juga sesuai dengan jawaban dari informan 2, yang menguraikan :

“kondisi birokrasi DPRD Sukoharjo berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan norma perundang-undangan yang ada. Jadi kelembagaan unturnya baik itu dari pimpinan dewan. Gini, birokrasi kan ada dua, DPRD nya dulu baru ada sekretariat. Otomatis kalo sekretariat sesuai dengan ketentuan yang ada di PNS dan berjalan sebagaimana mestinya. Trus kalo DPRD, adanya pimpinan dewan, keanggotaan, kelembagaan. Kelembagaan itu dalam arti baik itu badan, itu berjalan sebagaimana mestinya struktural keorganisasian. Jadi ndak ada kendala dalam birokrasi DPRD Sukoharjo sendiri.” (Pak Giyarto, 05 Januari 2018)

Struktur DPRD Sukoharjo yang memiliki struktur telah membangun bentuk pola komunikasi organisasi. Pola komunikasi organisasi memiliki jaringan komunikasi formal yang mana mengatur tentang penyampaian pesan yang berupa permasalahan tertentu, Komunikasi yang terjadi antar struktural yang tersebar di beberapa jabatan di dalam DPRD Sukoharjo memiliki tujuan untuk menyampaikan segala bentuk informasi, maupun hal tertentu yang dapat didiskusikan dan dikomunikasikan bersama. Komunikasi formal digunakan dalam sebuah kesempatan tertentu, seperti rapat pleno, rapat paripurna maupun kesempatan formal lainnya. Seperti yang dikatakan informan 3 :

“Komunikasi yang kita pake formal mba, biasanya dipakenya pas lagi rapat – rapat yang mana rapat itu dihadiri oleh seluruh ketua sampe anggota dewan. Kadang juga rapat yang sama bupati. Yo intine yang pake protokoler. Ada susuna acaranya, ada tatacaranya yang mana wajib banget komunikasinya pake formal.” (Pak Dahono, 15 Januari 2018)

Komunikasi yang terjadi dalam sebuah forum rapat mewajibkan penggunaan bahasa, gaya penyampaian pesan yang formal. Komunikasi formal dalam hal ini mempengaruhi segala bentuk penyampaian pesan. Semisal saat adanya intrupsi maupun intruksi yang diberikan. Informan 4 menuturkan :

“kalo momentnya pas rapat formal ya mau gak mau harus semuanya formal mas. Gak cuman bahasanya, tapi sampe gaya pakaian, cara kita duduk harus formal. Yang paling keliatan adalah kalo ada anggota dewan dari komisi atau fraksi tertentu mau kasih intrupsi. Caranya ya harus tau kapan harus ngomong, angkat tangan dulu, baru boleh bicara saat ketua dewan mempersilahkan, walaupun kadang tatanan bahasanya gak formal cuman pesan yang mau dikomunikasikan harus berfokus pada apa yang sedang di bahas, atau yang ingin di setuju.” (Pak Suryadi, 22 Januari 2018)

Komunikasi formal yang digunakan dalam DPRD Sukoharjo tidak hanya digunakan dalam sebuah rapat pleno maupun paripurna saja namun juga saat penyampaian dan pembagian tugas antar jabatan masing masing. Pembagian dan

penyampaian tugas antar jabatan juga menggunakan komunikasi formal. Penyampaianya pun menggunakan sebuah media non verbal, baik berupa nota tertulis, maupun tercantum dalam sebuah peraturan – peraturan. Penyampainya pun dilakukan secara menyeluruh kolektif maupun personal. Penyampaian pesan berupa tugas kepada pemangku jabatan secara kolektif dilakukan dari badan musyawarah yang mempunyai wewenang untuk mengatur apa saja tugas dan kegiatan dari DPRD Sukoharjo kepada ketua komisi atau fraksi, lalu di teruskan kepada anggotanya. Selain itu, penyampaian secara personal juga dilakukan dengan tujuan agar dapat mendapatkan feedback yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Penyampaian tugas secara personal pun bertujuan untuk pesan yang ingin disampaikan, tersampaikan dengan komunikator secara langsung dan sesuai. Informan 1 menuturkan:

“penyampaian tugas kepada seluruh pemangku jabatan dilakukan oleh bamus atau badan musyawarah sebagai pemilik wewenang dalam mengatur kegiatan dan tugas yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku jabatan. Penyampaianya pun beragam, kadang disampaikan lewat ketua dewan atau ketua komisi atau fraksi, kadang juga langsung di omongkan ke masing masing komisi atau fraksi. Aslinya tugas masing masing anggota dewan itu sudah jelas dan sudah tercantum dalam pemendagri itu. Tapi kan setiap tahun bisa beda. Bukan tugas pokoknya yang berubah tiap tahun, tapi apa saja yang harus dilakukan setiap tahunnya kan beda beda. Sesuai apa yang terjadi sama tahun itu. Toh juga tugas yang ingin dilakukan juga sudah disetujui bersama dalam suatu forum rapat yang formal.” (Pak Loubrin, 05 Januari 2018)

Hal ini diperkuat dengan penuturan informan 2 tentang bagaimana komunikasi formal digunakan dalam penyampaian tugas antar jabatan;

“tugas yang disampaikan sih beragam dari bamus, cuman kita sebagai anggota dewan sebenarnya sudah atu apa yang harus dikerjakan. Karena saat awal dilantik juga sudah dijelaskan dengan gamblang dalam buku yang dibagikan dan dijadikan pedoman oleh anggota dewan. DPRD Sukoharjo kan punya alat kelengkapan ya salah satu contohnya bamus tadi yang memang punya kewenangan menentukan, membuat dan menyampaikan apa saja yang akan dilakukan oleh anggota dewan dalam tiap tahunnya selama masa jabatan berlangsung.” (Pak Giyarto, 05 Januari 2018)

Komunikasi formal menjadi bagian yang sangat penting dalam membangun komunikasi di DPRD Suloharjo. Penggunaan ini menunjukkan bahwa DPRD Sukoharjo merupakan lembaga pemerintahan yang terdiri dari beberapa

jabatan, dan dijalankan oleh orang – orang , sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi formal yang digunakan dalam DPRD Sukoharjo juga mengandung beberapa konsep jaringan komunikasi formal. Seperti konsep komunikasi dari atas ke bawah, atau yang di dapat disebut *upward communication*. Komunikasi dari atas ke bawah terjadi manakala pemangku jabatan tertinggi memberikan sebuah pesan kepada pemangku jabatan setelahnya. Komunikasi dari atas ke bawah dalam DPRD Sukoharjo terbentuk manakala ketua dewan memberikan sebuah pesan yang berisi tentang arahan tugas, instruksi tugas kepada anggota dewan. Instruksi tugas bermacam macam, dan tentunya mengacu kepada undang undang yang berlaku. Selain itu, dalam DPRD Sukoharjo juga terbentuk pola komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi dari bawah ke atas terbentuk manakala pemangku jabatan atau anggota dewan (dalam hal ini anggota DPRD Sukoharjo) memberikan pesan kepada ketua dewan. Komunikasi dari bawah ke atas mencakup tentang permasalahan yang dihadapi anggota dewan, apa yang sudah dikerjakan, masalah – masalah yang ditemui. Sebagai gambaran dari berjalanya birokrasi di DPRD Sukoharjo, anggota dewan memiliki kewenangan untuk memberikan masukan tentang apa saja yang telah ditemui dilapangan untuk dapat diberikan solusinya. Sebagai contoh suatu kecamatan mempunyai masalah dalam perbaikan jalan. Seorang masyarakat mengadukan hal ini kepada salah seorang anggota dewan untuk memberikan bantuan kepada mereka berupa dana untuk perbaikan jalan. Disinilah anggota dewan mempunyai wewenang untuk menginformasikan, mengkomunikasikan hal ini kepada ketua komisi atau ketua dewan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan feedback berupa pemecahan masalah dari pesan yang telah dikomunikasikan. Pernyataan ini dibenarkan oleh informan 3 :

“ketua dewan biasanya kasih instruksi tentang apa aja yang kita sebagai anggota dewan laksanakan, itupun gak boleh lewat dari tupoksi kita sebagai anggota dewan. Intinya, semua tugas kan sudah ada di permendagri. Instruksi biasanya berfariatif namun tetap terkolektif. Dilain itu, biasanya kalo kita nemuin permasalahan dikonstituen kita, permasalahan ini kita bawa ke dewan untuk di komunikasikan, dicari titik temunya bersama sama, solusinya apa. Kalo sudah setuju baru dirasa

perlu mengajukan suatu anggaran ya kita anggarkan. Birokrasinya langsung ke dewan anggaran.” (Pak Dahono, 15 Januari 2018)

Hal yang sama juga di tuturkan oleh informan 2 :

“walaupun kita kolektif tetep kita juga aqda instruksi dari ketua dewan ataupun ketua komisi. Semuanya ada birokrasinya ada tata caranya. Namanya juga lembaga setara pemerintahan yang formal tentunya semuanya juga dibangun dnegan formal, terutama komunikasi yang dibangun. Walaupun demikian kita juga punya kesempatan kapan mengkomunikasikan maslah yang kita kemui di masyarakat untuk dicarikan solusinya secara bersama.” (Pak Giyarto, 05 Januari 2018)

3.1.2 Komunikasi Informal dalam DPRD Sukoharjo

Komunikasi informal merupakan jaringan dari pola komunikasi organisasi setelah jaringan komunukasi formasl. Komunikasi informal terbentuk di luar komunikasi formal. Terbentuknya komunikasi informal didapatkan dari berbagai hal seperti, ikatan persahabatan sesama teman kerja, sesama pemangku jabatan ataupun berada di bawah lembaga yang sama. Selain itu komunikasi informal juga dapat terbentuk didasarkan adanya kesamaan terhadap minat, atau hobi tertentu.

Komunikasi informal juga terbangun dalam pola komunikasi organisasi yang digunaka sehari hari oleh seluruh pemangku jabatan di DPRD Sukoharjo. Penggunaanya dirasa penting mengingat rutinitas tugas yang telah diberikan serta penyampaian pesan tertentu juga akan efektif jika menggunakan jaringan komunikasi informal ini. Seperti yang dikatakan oleh informan 1 :

“kembali diawal mba, walau kita sebuah lembaga setara pemerintahan yang formal namun tidak harus selalu formal. Temuan permasalahan dikonstituen, hasil rapat bahkan keluh kesah dari sesama anggota dewan kadang kita bahas mungkin saat makan siang, atau saat jam istirahat atau mungkin saat bertemu dalam acara acara di luar lingkun DPRD.” (Pak Loubrin, 05 Januari 2018)

Penggunaan komunikasi informal dalam DPRD Sukoharjo juga di iyaikan dengan penuturan dari informan 4:

“kalo sehari hari di luar forum formal sih ya kmunikasi kita informal mba. Biasa antara teman satu komisi, satu fraksi atau gak ya silang komisi. Bahasnya kadang gak cuman tentang kerjaan saja tapi juga bisa ceriuta tentang keluarga atau apapaun. Ya intinya biar nambah kedekatan.” (Pak Suryadi, 22 Januari 2018)

Komunikasi informal bersifat fleksibel. Tidak terpaku kepada suatu atura tertentu ataupun sikap tertentu. Komunikasi informal yang digunakan didalam DPRD Sukoharjo terjadi tidak hanya dalam sebuah percakapan verbal, secara

interpersonal namun juga non verbal, dengan media media seperti saat ini hadirnya aplikasi media sosial dalam gadget masing masing. Gaya komunikasi antar anggota DPRD Sukoharjo mempengaruhi penyampaian pesan kepada komunikator. Subtansinya, berkaitan dengan apa saja yang ingin disampaikan berdasarkan fungsi dari komunikasi informal ini di bangun. Komunikasi informal mengkonfrimasi pesan yang disampaikan dari komunikasi formal. Konfirmasi bisa berupa klarifikasi ataupun pembenaran pesan yang sebelumnya disampaikan dalam komunikasi formal. Komunikasi informal dapat menjadi jembatan dari kesenjangan pesan yang tidak jelas dari komunikasi formal. Hal ini berlaku disaat penyampaian pesan melalui komunikasi formal kurang jelas dan terdapat kesenjangan didalamnya.

Komunikasi informal yang terjadi di DPRD Sukoharjo juga dapat berupa sikap. Sikap yang ditunjukkan secara tidak langsung melancarkan penyampaian pesan kepada komunikator. Sikap yang ditunjukkan bermacam macam, seperti saat duduk bersama dan mengobrol santai, atau di saat menghadiri acara acara, atau berkunjung ke kediaman sesama anggota dewan. Sikap yang ditunjukkan juga bagaimana berbicara, menanggapi dan mengonfirmasi pesan yang sebelumnya disampaikan secara formal. Komunikasi informal tidak hanya dilakukan antar pemangku jabatan di DPRD Sukoharjo namun juga kepada masyarakat sebagai konstituen. Seperti yang dijelaskan oleh informan 4 :

“komunikasinya kan tidak hanya sebatas sama temen temen di DPRD saja tapi juga sama masyarakat juga. Masyarakat sebagai konstituen kita pastinya punya beragam problem yang tidak bisa di handle mereka saja, tentunya aperlu adanya sebuah campur tangan pemerintah. Nah kita sebagai partne dari pemerintah mau tidak mau kan harus ikut membantu dan memberikan solusi, karena kududukan kita sebagai kepanjangan tangan amsyarakat ke pemetintah pastinya kerja kita juga tidak bisa lepas dari masyrakat”. (Pak Suryadi, 22 Januari 2018)

Berbagai permasalahan yang di sampaikan oleh masyrakat, di konfersikan kepada sebuah komunikasi formal yang nantinya dapat menjadi *problem sharing* antar komisi. Komunikasi informal juga dilakukan dalam keterbukaan informasi kepada masyrakat melalui media media non verbal, seperti penggunaan website maupun pertunjukan seni dan budaya. Hal ini sebagai bentuk keterbukaan DPRD Sukoharjo kepada seluruh konstituenya se kabupaten Sukoharjo. Komunikasi

informal yang digunakan sangatlah dekat dan menjadi pola komunikasi organisasi yang sangat mudah dilakukan dan tidak kalah penting dengan komunikasi formal. Melalui komunikasi informal juga dapat mengkonfirmasi pesan yang belum jelas.

Penggunaan komunikasi informal selain itu, dapat menjadi media pendekatan baik antar anggota, antar komisi, antar fraksi, antar badan perangkat hingga mencakup seluruh komunikasi. Informan 2 membenarkan hal itu :

“kalo komunikasi informal kan basicnya gak harus formal jadi kapanpun kita mau bahas sesuatu yang mungkin masih ada urusannya dengan pekerjaan kita atau tugas tugas yang mungkin kurang begitu jelas bisa di bahas d luar kantor, dan bisa menambah kedekatan kita antar sesama anggota DPRD Sukoharjo.” (Pak Giyarto, 05 Januari 2018)

3.2 Pembahasan

DPRD Sukoharjo merupakan lembaga pemerintahan yang setara dengan pemerintahan kabupaten Sukoharjo. DPRD Sukoharjo memiliki anggota 45 orang dengan 1 ketua dan 3 wakil ketua yang membawahi 4 komisi yang terdiri dari komisi 1 bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan, komisi 2 bertanggung jawab dalam bidang ekonomi dan keuangan, komisi 3 bertanggung jawab dalam bidang pembangunan, dan yang terakhir komisi 4 bertanggung jawab dalam bidang kesejahteraan rakyat. Komisi mempunyai tugas diantaranya melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan keputusan DPRD, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan, pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai bidang tugas komisi masing – masing dan masih banyak lagi tugas tugas dari komisi. Komisi dalam DPRD Sukoharjo menjadi bagian dari birokrasi yang utuh beserta alat kelengkapan DPRD yang terbagi dalam badan badan. Selain komisi dan badan kelengkapan DPRD di samping itu ada yang tidak kalah penting, DPRD Sukoharjo juga terdapat fraksi fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai pemilik kursi atau suara di Kabupaten Sukoharjo.

Sebagai bentuk kelembagaan pemerintah, DPRD Sukoharjo memiliki sebuah tatanan birokrasi, dimana birokrasi merupakan sebuah tatanan administratif yang mengutamakan konsep formal, tergalisirkan oleh sebuah tatanan hukum dan struktur yang hirarkis. Sistem birokrasi ini merupakan

terobosan sebuah konsep administratif yang di bawa oleh Max Weber. Menurut Weber dalam Pace dan Faules (2013), sebuah birokrasi yang ideal memiliki ciri ciri atau karakteristik tertentu. DPRD Sukoharjo ditinjau dari sistem birokrasinya memiliki karakteristik berdasarkan teori weberian. Pertama, suatu birokrasi terdiri dari hubungan – hubungan yang di tetapkan antara ajabaran-jabatan. Kedua, tujuan atau rencana organisasi, terbagi ke dalam tugas – tugas. Ketiga, kewenangan untuk melaksanakan kewajiban, diberikan kepada jabatan. Keempat, suatu sistem aturan dan regulasi yang umum tetapi tegas, yang di tetapkan secara formal, mengatur tindakan-tindakan dan fungsi-fungsi jabatan dalam organisasi. Kelima, suatu sikap dan prosedur untuk menerapkan suatu sistem disiplin merupakan bagian dari organisasi. Karakteristik ini tidak bisa lepas dari adanya bentuk komunikasi. Sembiring (2014) menjelaskan, di dalam organisasi khususnya birokrasi yang merupakan landasan dalam sebuah kegiatan organisasi komunikasi merupakan dsar dari yang menyatukan semua fungsi yang terwujud dan berjalan hingga saat ini dalam organisasi tersebut. Adanya saluran komunikasi didalamnya menjadikan setiap anggota dapat berinteraksim, memahami dan bertukar pesan natar satu dengan yang lainnya namun juga dapat meuwujudkan kerja sama yang berkesinambungan di kalangan anggota kelompok.

Karakteristik birokrasi yang diasumsikan oleh weber terbangun dengan berbagai macam pola komunikasi. Pola komunikasi inilah yang membentuk sikap, tata bahasa, dan bentuk lingkungan dan jaringan sosial antar anggota organisasi maupun kepada ketua organisasi, dari sinilah pola komunikasi yang terbangun disebut dengan pola komunikasi organisasi. Walaupun demikian masih terdapatcelah dalam teori Weberian ini dimana konsep teori yang di bawanya mengedepankan kekuasaan sebagai kunci utama dalam menjalankan birokrasi di sebuah organisasi. Menurut Binod dalam Yarosca (2016) mengatakan pola komunikasi akan efektif membentuk pesan sehingga akan mudah sampai pada orang yang dituju. Pembentukan pola komunikasi organisasi akan terjadi dengan sendirinya, hal ini dikarenakan komunikasi yang dilakukan dalam organisasi dilakukan berulang ulang.

Jaringan dari komunikasi organisasi dikenal dengan komunikasi formal dan informal. Keduanya merupakan jaringan yang bersinergi, seperti yang dikemukakan Efendy dalam Sulaiman (2013), sistem dari jaringan komunikasi formal biasanya mengikuti garis garis wewenang sebagai mana telah dicantumkan dalam dalam struktur organisasi. Thoha dalam Sudrajat (2014) juga menyatakan komunikasi organisasi formal merupakan proses komunikasi yang mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar dalam suatu struktur organisasi. Sedangkan jaringan komunikasi informal terbentuk berdasarkan hubungan – hubungan sosial yang dapat memiliki kekuatan untuk menuangkan pesan yang ingin disampaikan melalui sistem formal dengan tujuan pesan tersebut dalam langsung diterima sesuai dengan sistem jaringan komunikasi formal. Melihat karakteristik birokrasi Weber yang menitikberatkan bahwa suatu organisasi memiliki struktur yang terbagi dalam jabatan – jabatan, komunikasi formal tentunya terbangun dalam DPRD Sukoharjo. Komunikasi formal dalam DPRD Sukoharjo terbentuk antara anggota DPRD dengan ketua DPRD Sukoharjo. Birokrasi yang sehat terlihat dalam dinamisnya interaksi antar anggota kepada ketua organisasi. begitu pula dalam DPRD Sukoharjo

Selain itu komunikasi formal yang digunakan dalam DPRD Sukoharjo terdapat dalam pembagian tugas yang dilaksanakan setiap setahun sekali dan di jalankan sesuai dengan fungsi dan kewenangan jabatan yang telah ditetapkan. Rancangan pembagian tugas mengacu kepada agenda tahunan kabupaten dan perkembangan serta hasil pengawasan terhadap suatu permasalahan di kabupaten Sukoharjo setahun sebelumnya. Pembagian tugas dirancang oleh badan musyawarah dan di bantu oleh sekretariat dewan. Pendistribusian atau pembagiannya kepada seluruh anggota dewan di komunikasikan dengan formal dan menggunakan media verbal maupun non verbal. Media verbal dalam pembagian tugas oleh DPRD Sukoharjo terlihat dengan diadakanya rapat bersama seluruh ketua hingga anggota DPRD Sukoharjo, dalam rapat tersebut badan musyawarah menyampaikan apa saja yang menjadi tugas kerja serta kegiatan DPRD Sukoharjo dalam satu tahun periode. Dan media non verbal yang digunakan dalam pembagian tugas menggunakan surat atau semacam bentuk visual sebagai media

informasi kepada seluruh anggota DPRD Sukoharjo termasuk anggota DPRD yang berstatus PAW atau Pergantian Antar Waktu. Tentunya komunikasi formal dalam tatanan birokrasi DPRD Sukoharjo tidak bisa terlepas begitu saja. Hal ini juga berlaku terhadap penganggaran dan penyampaian aspirasi dalam rapat-rapat pendapat. Baker dalam Nwogbaga, Nwankwo dan Onwa (2015) mengutarakan bahwa komunikasi formal dapat diartikan dan terlihat secara sederhana dalam rapat, diskusi secara tatap muka, memo, surat menyurat, email ataupun laporan.

Jaringan pola komunikasi organisasi lainnya yaitu komunikasi informal juga selalu digunakan dalam komunikasi antar anggota maupun kepada ketua DPRD Sukoharjo, dalam lingkup diluar formalitas. Komunikasi informal terbentuk antar masing masing individu berdasarkan minat, dan kesamaan antar satu jabatan. Komunikasi informal dipercaya menjadi bentuk pendekatan yang humanis, hal ini dikarenakan komunikasi informal menjadi jaringan komunikasi yang paling mudah dilakukan dalam pembentukan sebuah komunikasi organisasi. Roethlisberger dan Dickson dalam Conrath (1973) mengemukakan, pendekatan manusia atau pendekatan manusiawi, humanis kedalam organisasi dan management dapat menjadi sebuah bentuk pendekatan yang sangat baik. Mungkin ini yang dapat dikatakan sebagai sebuah esensial dan kajian dalam lingkungan hidup ataupun akademis. Pendekatan secara humanis melalui komunikasi informal dirasa lebih baik dibandingkan dengan pendekatan secara fisik melalui lingkungan sekitarnya atau sekitar organisasi. Komunikasi informal dalam DPRD Sukoharjo terbangun dengan baik disini. Walaupun terbangun dalam lingkup satu jabatan ataupun satu lembaga dimana dapat digambarkan sebagai teman kerja, namun komunikasi informal yang terbentuk di DPRD Sukoharjo juga memiliki kandungan pesan yang hampir sama dengan komunikasi formal. Penggunaannya saja yang berbeda. Pesan yang ingin dibahas tidak harus dalam sebuah rapat formal namun disaat jam istirahat makan siang, saat bertemu dengan masyarakat maupun dalam media sosial seperti grup whats app.

Dalam penelitian sebelumnya tentang pola komunikasi organisasi pada fans club Juventini Boyolali yang digagas oleh Dewanto (2017), terdapat tiga pola komunikasi dalam fans club tersebut. Pertama, komunikasi dari atas ke bawah,

lalu komunikasi dari bawah ke atas dan juga komunikasi horizontal. Ketiga pola komunikasi tersebut terjadi setiap harinya dalam fans club ini. Komunikasi dari atas ke bawah mencakup bagaimana ketua dari organisasi fans club ini memberikan arahan kepada anggota tentang agenda terbaru yang akan dilaksanakan oleh fans club. Komunikasi dari bawah ke atas mencakup bagaimana anggota organisasi memberikan masukan terhadap segala macam kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama dalam menjaga solidaritas fans club. Terakhir yaitu komunikasi horizontal yang lebih bersifat informal, dimana pola komunikasi ini terjadi saat sesama anggota duduk bersama dan membahas tentang kegiatan maupun apa saja yang adaat menjaga solidaritas mereka.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti melihat pola komunikasi organisasi dalam DPRD Sukoharjo terdapat komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, komunikasi formal dan komunikasi informal. Pola komunikasi tersebut mencakup bagaimana bentuk interaksi melalui pemberian intruksi, masukan dan aspirasi yang terjadi dalam DPRD Sukoharjo baik kepada pimpinan dewan maupun antar sesama anggota DPRD Sukoharjo. Komunikasi ini terlihat dalam rapat paripurna, rapat pleno, yang menghasilkan berbagai macam keputusan dan berakhir kepada instruksi untuk mengawasi hasil keputusan tersebut, sesuai dengan fungsi dari DPRD sebagai instansi setara pemerintahan yang juga punya wewenang menjalankan otonomi daerah dengan asas pemerintahan. Tak hanya itu, pola komunikasi tersebut juga mencakup dalam pembagian tugas untuk mencapai tujuan organisasi khususnya tujuan DPRD Sukoharjo sebagai bagian dari perwakilan publik.

4 PENUTUP

Komunikasi formal terbentuk berdasarkan penyampaian komunikasi kepada pemangku jabatan yang lebih tinggi. Penyampaiannya pun menggunakan gaya bahasa, sikap yang formal. Dalam DPRD Sukoharjo penggunaan komunikasi formal terjadi dalam struktur DPRD Sukoharjo dan juga pembagian tugas kepada seluruh anggota DPRD Sukoharjo. Birokrasi yang mengatur struktur DPRD

Sukoharjo membangun beberapa jaringan komunikasi lain yang juga bagian dari komunikasi formal dan pola komunikasi organisasi.

Komunikasi informal juga terjadi dalam birokrasi DPRD Sukoharjo. Prosesnya berperan dalam penyampaian dan tukar informasi baik antar komisi hingga fraksi. Hal yang dibahas dalam bentuk informal tadi dapat di konfersi menjadi sebuah aspiara yang nantinya dapat disampaikan secara formal dan terbirokrasi dengan baik. Pesan di luar DPRD Sukoharjo juga didapatkan saat anggota DPRD Sukoharjo dalam komisi tertentu bertemu langsung dengan masyarakat. Penyampaiannya yang verbal dengan pola komunikasi informal ini justru dapat memudahkan pesan tersebut terkomunikasikan dengan baik. Sehingga anggota DPRD Sukoharjo dengan mensharingnya dengan sesama komisi maupun komisi yang bersangkutan. Karena pada dasarnya komunikasi informal terbentuk berdasarkan jalinan persahabatan, mitra kerja maupun kesamaan minat terhadap sesuatu.

Kekurangan dalam penelitian ini kurangnya eksplorasi peneliti secara mendalam terhadap landasan teori yang digunakan. Sehingga belum terincinya pola komunikasi organisasi di DPRD Sukoharjo. Masih terdapat teori yang mendeskripsikan secara global bagaimana pola komunikasi organisasi berjalan setiap harinya. Peneliti juga masih belum menyadari masih banyaknya teori yang dapat digunakan dalam mendeskripsikan dan menganalisis pola komunikasi organisasi didalam birokrasi pemerintahan seperti di DPRD Sukoharjo. Bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti pola komunikasi organisasi dalam bentuk organisasi, instansi yang lain. Selanjutnya objek yang diteliti dapat lebih dikembangkan lagi dan mendalam tentang komunikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustamar, M. (2014). Restrukturisasi Birokrasi Dan Pengembangan Good Governace (Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi Dan Efisiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang). *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi*, 1(1).
- Akbar, Amin, M. J., & Budiman. (2017). PERAN SEKRETARIAT DEWAN DALAM MENUNJANG KINERJA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 1181–1190.

- Asmawi. (2014). DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH*. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 18. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1443>
- Conrath, D. W. (1973). Communication Patterns, Organizational Structure, and Man: Some Relationships. *Human Factors: The Journal of Human Factors and Ergonomics Society*, 15(5), 459–470. <https://doi.org/10.1177/001872087301500503>
- Dewanto, A. B. (2017). Pola Komunikasi Organisasi pada Fans Club Juventini Boyolali dalam Menjalin Solidaritas (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang pola Komunikasi Organisasi Pada Fans Club Juventini di Boyolali). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Dewi, F. U. (2011). Urgensi Komunikasi Cerdas Dalam Birokrasi Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1), 109–124.
- Fitriawan, R. A., Putra, D. K. S., & Nugroho, C. (2017). Analisis Komunikasi Birokrasi atas Kualitas Layanan Publik di Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung. *CHANNEL*, 5(1), 59–82.
- Harsono, A. Y., Supratomo, & Farid, M. (2015). Analisis Gaya Kepemimpinan Dan Komunikasi Organisasi Antara Atasan-Bawahan Dalam Membangun Budaya Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Dprd Kota Bengkulu. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 4(3), 328–343.
- Iskandar, Abubakar, Gina, Wibowo, & T, Cahyono. (2014). Pengaruh Transformasi Sistem E-Learning Terhadap Minat Belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Wikrama Di Kota Bogor. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 12(2), 13.
- Jain, A. (2004). Using the lens of Max Weber Theory of Bureaucracy to examine E-Government Research. *Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS'04)*, 0(C), 1–10. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2004.1265321>
- Kadir, A. (2015). Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, 40–54.
- Kriyantono, Rachmat. (2006). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Masyhudi. (2005). Kinerja birokrasi pemerintah dalam pelayanan kepada publik. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, VI(1), 47–66

- Myint, M. K. (1997). Bureaucracy: Problems and Strategies for Overcoming It. *ABAC Journal*.
- Nabavi, S. A., Hosseinzade, A. H., & Allameh, S. (2014). The Study of Bureaucratic Characteristics in the Administrative Organizations of Iran The Case of Personnel of Governmental Organizations in Ahvaz City, *4*(23), 104–113.
- Nuriah, S. W. (2012). PENGARUH KEWENANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP EFEKTIVITAS MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI JAKARTA UTARA. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 479–487.
- Nwogbaga, D. M. E., Nwankwo, O. U., & Onwa, D. O. (2015). Avoiding School Management Conflicts and Crisis through Formal Communication. *Journal of Education and Practice*, *6*(4), 33–36. Retrieved from <http://search.ebscohost.com>
- Pearson, Judy C. (2011). Human Communication. *McGraw-Hill, New York*, 431 p.
- Purworini, D. (2014). Model Informasi Publik Di Era Media Sosial : Kajian Grounded Teori Di Pemda Sukoharjo. *Komuniti*, *6*(1), 1–12. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Journal Equilibrium*. Retrieved from yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Samin, R. (2011). Reformasi Birokrasi. *Fisip Umrah*, *2*, 1–182.
- Sembiring, S. (2005). Komunikasi formal dan pengambilan keputusan. *Pengantar Manajemen Organisasi*, *1*(4), 1–19.
- Setyawan, S. (2017). Pola Proses Penyebaran Dan Penerimaan Informasi. *Jurnal Komuniti*, *9*(2), 146–156.
- Somad, K. A. (2011). Kedudukan Dprd Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia Pasca Perubahan Uud 1945. *MMH*, *40*(4), 479–483.
- Sudrajat, M. (2014). Pola Komunikasi Organisasi di Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Keadilan Peduli Umat (Pkpu). *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Sulaiman, A. I. (2013). Model Komunikasi Formal Dan Informal Dalam Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, *16*(2), 173–188.

- Suwarno. (2008). Birokrasi Indonesia : Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik. *Unisia*, XXXI(69), 254–261.
- Wayne Pace, R. & Faules, Don F. (2013). Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Yarosca, E. T. (2016). Pengaruh Pola Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Karyawan LPP RRI Surakarta (Pola Komunikasi Antara Pimpinan dan Karyawan di Radio Republik Surakarta). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Yusrialis. (2012). BUDAYA BIROKRASI PEMERINTAHAN (Keperihatinan dan Harapan). *Jurnal Sosial Budaya*, 9(1), 1–28.